

BAB II

KONDISI POLITIK INDONESIA TAHUN 1999-2004

2.1 Pemerintahan Demokratis

Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, perubahan dalam sistem politik yang cukup besar terjadi pasca turunnya Soeharto sebagai presiden dimana Presiden Soeharto mengelola pemerintahan secara sentralistik. Pemerintahan otoriter ini berdiri selama 32 tahun dengan menutup akses demokrasi bagi masyarakat, dengan jatuhnya pemerintahan tersebut memberikan perubahan pada sistem politik dari otoriter menjadi reformasi dengan ditandai adanya liberalisasi politik dan ekonomi. Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998 dan demokrasi kembali hadir dan dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari adanya suatu partisipasi politik yang tinggi dari rakyat dimana jumlah partai politik peserta pemilu 1999 pun mengalami lonjakan.

Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya tidak langsung berakhir begitu saja, pemerintahan Indonesia dihadapkan oleh berbagai tuntutan serta persoalan-persoalan negara yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan Soeharto, termasuk dengan keabsahan dari jabatan kepresidenan yang sedang dipegang oleh Habibie yang masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat, dimana banyak sekali tuntutan yang digulirkan oleh gerakan reformis diantaranya : 1) penegakan supremasi hukum, 2) pemberantasan KKN, 3) mengadili Soeharto beserta kroninya, 4) melaksanakan Amandemen UUD 1945, 5) pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, 6) penghapusan dwifungsi ABRI. Pemerintahan Habibie

berjanji akan melakukan reformasi secara bertahap serta konstitusional dan juga pemerintah akan terus berkomitmen untuk memulihkan kembali kehidupan politik yang demokratis serta meningkatkan kembali kepastian hukum.¹

Pemerintahan Habibie pada masa awal jabatannya menyampaikan pernyataan melalui pidato saat Habibie dilantik ia menyampaikan bahwa rencana pertama yang akan dilakukan oleh pemerintahannya adalah menciptakan negara yang demokratis serta melakukan perubahan serta penghapusan sistem politik masa Orde Baru dan menggantikannya dengan sistem politik yang lebih demokratis. Pemerintahan awal reformasi membentuk kabinet yaitu Kabinet Reformasi pembangunan, dimana kabinet tersebut akan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 serta akan terus menyesuaikan dengan dinamika serta aspirasi dari masyarakat dan kabinet tersebut akan menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tuntutan dari gerakan reformis adalah pemberantasan KKN dan mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya, dengan mundurnya presiden Soeharto dari jabatannya dengan berbagai kontroversi salah satunya adalah kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kasus tersebut dituduhkan kepada presiden Soeharto yang diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (dakab, amal bakti muslim, pancasila, supersemar, dana sejahtera mandiri, gotong royong dan trikora). Ide pembentukan yayasan-yayasan ini memang

¹ M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm 694

sangat mulia dimana dibentuknya yayasan tersebut untuk menopang kehidupan para istri purnawirawan dan veteran perang serta membantu kesejahteraan petani teh serta membantu pendidikan anak-anak cerdas yang kurang mampu, singkatnya bertujuan untuk mensejahterakan keluarga miskin dan terlantar. Pelaksanaan dari yayasan-yayasan tersebut terasa ganjil dimana salah satu contohnya adalah dari separuh total dana yayasan ditanam dibidang bisnis, menurut Jaksa Agung Andi Ghalib mengakui bahwasannya penggunaan dana yayasan untuk kepentingan bisnis belum bisa dipersalahkan secara hukum, namun dari segi etika bisnis dan prinsip umum yayasan nyatanya tentu kurang tepat.²

Kasus korupsi banyak masuk ke kejaksaan, namun hanya puluhan kasus saja yang masuk ke pengadilan, pengadilan tentang korupsi masih dilakukan setengah hati oleh pemerintah. Pada kenyataannya di era reformasi sudah banyak menggulirkan terkait produk hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, namun setumpuk aturan tersebut hanya semacam kertas dan hanya menarik untuk dikampanyekan saja bukan untuk dilaksanakan.

Pada masa Orde Baru penyelenggaraan pemerintah daerah banyak diwarnai dengan pemerintahan pusat yang menentukan tentang pembangunan daerah, para elit-elit lokal yang berani menentang kebijakan pusat maka akan diganti baik dengan cara halus maupun kasar, maka dari adanya hal tersebut sangat mengakibatkan pada penurunan potensi yang ada di setiap daerahnya. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun

² Pusat data dan Analisa tempo, *Sejarah Korupsi Yayasan Soeharto*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019, hlm 57-58.

banyak mengalami persoalan, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 1956 telah memberikan peluang akan terjadinya pembagian keuangan yang tidak adil.

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan digantikan dengan pemerintahan yang demokratis, gerakan reformis menuntut diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dengan menguatnya tuntutan dari masyarakat reformis tersebut pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah agar memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan mengembangkan serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerahnya.³

Pemerintah banyak mengeluarkan berbagai surat keputusan serta melakukan perubahan Undang-Undang untuk kemajuan dan kebebasan dalam demokrasi di Indonesia untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. Pemerintah melakukan beberapa kali perubahan Undang-Undang untuk Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan Negara yang sangat penting bagi eksistensi Negara dan perjuangan Negara mewujudkan demokrasi, Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.

Era Reformasi membuka peluang berdirinya partai-partai politik, akibat dari adanya hal tersebut ratusan partai politik berdiri untuk menghadapi pemilu tahun 1999 dimana terdapat 181 partai politik berdiri hanya dalam kurun waktu satu tahun setelah dilakukannya reformasi. Partai politik yang

³ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, hlm.

berdiri sebanyak 181 namun yang diterima oleh departemen kehakiman sebanyak 141 partai politik, dari 141 partai politik yang diterima hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu 1999 yang dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999.⁴

Pemilu tahun 1999 telah dilaksanakan untuk pemilu berikutnya dilakukan pengurangan partai politik yang dilakukan secara bertahap yaitu dengan menetapkan ambang batas perolehan suara partai secara nasional (*electoral threshold*) sebesar 2% sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu, partai politik yang memperoleh suara di bawah 2% dinyatakan tidak lolos dan diharuskan berganti nama jika ingin mengikuti pemilu 2004. Partai politik yang terdaftar pada tahun 2002 meningkat menjadi 237 partai politik namun yang diterima oleh departemen kehakiman sebanyak 50 partai politik dan dari 50 partai tersebut terdapat 24 partai politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu tahun 2004.⁵

Pemilu tahun 2004 dapat dikatakan sebagai pemilu transisi menuju demokrasi, hal tersebut dapat dilihat dari anggota DPR yang berjumlah sekitar 550 orang dipilih lewat pemilu serta TNI sudah menarik diri dari keterlibatannya dalam perpolitikan. Pemilihan umum tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik yang memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum, partai-partai yang mengikuti pemilu diantaranya : Partai Golongan Karya (Golkar),

⁴ Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015, hlm 109-110.

⁵ Adlin, *Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013, hlm.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan lain-lain.

Pemilihan Presiden tahun 2004 dilaksanakan dengan dua putaran, putaran pertama diisi oleh 5 paslon, no urut 1 ada H. Wiranto dan Salahuddin Wahid yang diusung oleh partai Golkar, no urut 2 ada Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh PDI, nomor urut 3 ada Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dicalonkan oleh PAN, nomor urut 4 ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang di usung oleh 3 partai sekaligus Demokrat, PBB dan partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) dan nomor urut terakhir diisi oleh Hamzah Haz dan Agum Gumelar yang dicalonkan oleh PPP.⁶

Putaran kedua dilaksanakan pada 20 September 2004 dengan 2 paslon, no urut 1 ada Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dan no urut 2 ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilihan Presiden 2004 pada putaran kedua terdapat 153,3 juta pemilih terdaftar dan 116,7 diantaranya mencoblos dan pemilihan presiden kedua dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

2.2 Disintegrasi Bangsa Indonesia

Indonesia selain dituntut agar segera keluar dari krisis ekonomi saat ini menghadapi berbagai tuntutan dari daerah baik yang menyangkut tuntutan

⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Pemilih Untuk Pemula*. 2010, hlm 44.

otonomi luas, otonomi khusus sampai kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan federalisasi hingga terdapat juga tuntutan kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh Timor Timur, dimana rakyat Timor Timur menuntut kemerdekaan kepada pemerintahan.

Pemerintahan Habibie tetap mempertahankan wilayah Timor Timur dengan memberikan banyak pengorbanan untuk membangun masyarakat Timor Timur dengan cara memberikan subsidi-subsidi melebihi provinsi lain, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat Timor Timur maupun dari masyarakat Internasional. Pada awal juni tahun 1998 Presiden Habibie mengumumkan dalam wawancaranya yang dilakukan oleh *British Broadcasting Corporation* (BBC) bahwa Presiden Habibie akan melakukan pertimbangan mengenai pemberian status khusus dengan otonomi luas kepada Timor Timur.⁷

Timor Timur merupakan bekas koloni dari Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia dan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1967 menjadi provinsi ke 27 di Indonesia. Timor Timur bergabung dengan Indonesia selama 22 di bawah pimpinan Presiden Soeharto, dimana pada masa Pemerintahan Soeharto untuk merebut Timor Timur tersebut dengan melakukan operasi militer yang bernama Operasi Seroja dan menelan banyak korban. Pemerintahan Soeharto juga melakukan pembangunan besar besaran di Timor Timur di berbagai bidang meskipun dengan campuran tindak kekerasan, dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru membuka cakrawala

⁷ Melkisedek Bagas, *Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie*. Singkawang: PT Maraga Borneo Tarigas, 2008.

baru untuk melakukan penyelesaian permasalahan Timor Timur yang berkeinginan melepaskan diri dari Indonesia.⁸

Timor Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia di dasari dengan beberapa Faktor, yaitu : (1) faktor internal meliputi: masalah HAM yang terjadi di Timor Timur, pemulihan ekonomi dan politik di Indonesia. (2) faktor eksternal meliputi: kuatnya tekanan dunia internasional terhadap penyelesaian masalah Timor Timur (desakan referendum), seperti halnya disampaikan dalam surat yang diberikan oleh Perdana Menteri John Howard kepada Presiden Indonesia yaitu B.J. Habibie dimana dalam surat tersebut berisi tentang keinginannya memberikan referendum bagi kemerdekaan Timor Timur.

Konflik-konflik antar kelompok yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu marak terjadi salah satunya adalah konflik Aceh yang tidak berkesudahan, konflik Aceh ini sudah berlangsung sejak lama dan persoalan yang paling aktual sepanjang masa transisi pemerintahan Indonesia, banyak nyawa yang terenggut dalam konflik Aceh dan juga banyak menyisakan duka dan derita selama konflik yang semakin berkepanjangan.

Konflik ini muncul karena kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto pada saat itu yang mengeluarkan kebijakan dan sentralisme yang tidak dapat memenuhi harapan masyarakat Aceh, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik tersebut salah satunya

⁸ Thomas Ximenes Saldanha, Status Tanah Dan Bangunan Milik Perseorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan Republica Democratica De Timor Leste. 2017.

adalah di masa Pemerintahan Soeharto menyelesaikan konflik aceh ini dilakukan dengan cara Hard power atau Operasi Militer, namun setelah jatuhnya Pemerintahan Soeharto pendekatan politik yang diambil oleh pemerintahan lebih halus dibanding dengan pemerintahan sebelumnya, dimana pemerintah mengambil pandangan bahwa Aceh ini sodara bukan lagi musuh negara maka segala bentuk Operasi militer dihentikan.⁹

Tuntutan merdeka kini seperti bola api yang memancar ke segala arah, dimana pawai-pawai akbar terus digelar untuk menyuarakan tuntutan referendum. Tuntutan referendum pun semakin deras, dimana tuntutan tersebut sudah digulirkan sejak pemerintahan Habibie berkunjung ke Aceh, namun bagi anggota TNI tuntutan referendum tersebut tidak masuk akal seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI bahwasannya gerakan yang menuntut referendum itu merupakan gerakan separatis inkonstitusional, tak diterima di belahan dunia manapun.¹⁰

Pemerintahan dalam meredam konflik yang sedang terjadi di Aceh ini dilakukan dengan berbagai cara baik itu dengan pendekatan persuasif maupun dengan cara pendekatan keamanan. Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk meredam konflik tersebut dilakukan dengan pendekatan persuasif, serta pemerintah juga memberikan otonomi khusus kepada Aceh, namun hal tersebut tidak dapat meredam suasana yang terjadi karena semuanya bermuara pada ketidakadilan yang pernah dialami. Ketidakadilan itu pun

⁹ Ikbal Husni, *Konflik Di Aceh Dan Langkah-Langkah Penyelesaian (1976-2005)*. Bandung, 2021).

¹⁰ Hidayat Tantan, Affan Bey Hutahut dan Koesworo Setiawan. *Jangan Tinggalkan Kapal*. Gatra, 1999 hlm 24-25.

tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Aceh saja tapi dirasakan oleh rakyat Papua.

Papua melakukan gerakan separatisme yang dipelopori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), hal tersebut berawal dari adanya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diorganisir oleh militer Indonesia dan digelar pada tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 dimana diwakili oleh 1,025 warga Papua dengan mengkaidahkan satu orang satu suara (*one man one vote*), hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) ini bagi rakyat Papua masih dianggap sebagai bentuk manipulasi Indonesia untuk menguasai tanah Papua.¹¹

Tuntutan Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia bukan pertama kali disuarakan secara terbuka oleh rakyat Papua, pada Februari 1999 sebuah delegasi beranggotakan 100 orang yang menyatakan dirinya sebagai wakil rakyat Papua menyampaikan hal yang sama kepada presiden yang saat itu jabatan presiden sedang dijabat oleh Habibie. Permintaan dari delegasi tersebut dijawab oleh Habibie bahwa kewenangan tersebut bukan kewenangan presiden melainkan kewenangan dari MPR, diluar jalur diplomasi yang dilakukan rakyat Papua juga terus melakukan perlawanan bersenjata yang tidak kunjung padam.¹²

Tuntutan yang digulirkan oleh Papua tersebut adalah mengenai keinginan masyarakat Papua melepaskan diri dari Indonesia, tuntutan tersebut berasal dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua dimana

¹¹ Decky Wospakrik, "Gerakan Separatisme Di Papua Mengurai Konflik Dan Solusi Penyelesaian Papua - Jakarta. Jayapura: 2018, hlm 3 "

¹² Iqbal Syamsi, *Menelusuri Jejak-Jejak OPM (Organisasi Papua Merdeka)*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019, hlm 16.

masyarakat Papua merasa kecewa atas perlakuan dari pemerintah pusat yang selama 32 tahun menguras kekayaan dari Papua namun masyarakat asli Papua tidak sepenuhnya bisa menikmati hasilnya. Pemerintah dalam meredam konflik tersebut sama seperti kepada Aceh memberikan otonomi khusus kepada Papua, namun diberikannya otonomi tersebut tidak dapat meredam konflik yang sedang terjadi.

Sebelum krisis melanda Indonesia sekitar 427 ribu orang penduduk Papua berada di bawah garis kemiskinan, dimana perekonomian daerah terutama di sektor perdagangan banyak dikuasai oleh pendatang baru. Harta melimpah ruah tidak dapat mengangkat kehidupan masyarakat Papua, kekecewaan lain yang dirasakan oleh masyarakat Papua adalah minimnya putra daerah yang ikut berkiprah di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Setelah 30 tahun Papua bergabung dengan Indonesia baru pertama kali di saat Abdurrahman Wahid menjadi presiden putra daerah Papua diangkat menjadi menteri.¹³

2.3 Terorisme

Terorisme menjadi perhatian dunia setelah terjadinya peristiwa pengeboman World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat, pengaruh yang diberikan oleh Amerika Serikat ini tidak dapat dipungkiri dimana hampir semua negara setuju untuk melawan terorisme tidak terkecuali dengan Indonesia.

¹³ Iqbal Syamsi, *Ibid.*, hlm 18

Indonesia merupakan negara yang dianggap memiliki ancaman terbesar dari terorisme, dimana di Indonesia sepanjang tahun 1999-2004 mengalami beberapa teror, yaitu : pada tahun 1999 di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta, Pada tahun 2000 di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Dubes Filipina, Pada tahun 2000 dan 2001 peledakan di beberapa Gereja di malam Natal, Pada tahun 2002 ledakan di Kuta Bali dan di McDonald Makassar, Pada tahun 2003 peledakan di JW Marriot, Pada tahun 2004 ledakan di Kedubes Australia.¹⁴

Terorisme menjadi sebuah isu dunia yang sangat besar salah satunya terjadinya pengeboman di Sari Club dan Paddy's Bar di Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, serangan bom ini menewaskan sekitar 202 orang sebagian besar adalah turis asing yang sedang berlibur di Bali, di antara korban yang meninggal tersebut sekitar 88 orang berasal dari negara Australia. Kejadian bom Bali tersebut membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada dunia karena satu alasan yang mendasar yaitu banyak warga negara asing yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, peristiwa tersebut juga mencoreng citra Bangsa Indonesia dan sangat berdampak terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Tertangkapnya Amrozi, Imam Samudra dan Muchlas setelah peristiwa bom Bali di tahun 2002, banyak analisis yang mengaitkan terorisme di Indonesia dengan jaringan terorisme internasional

¹⁴ Reni Windiani, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*. Ponegoro: *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 16, 2017, hlm 136.

Al-Qaeda dimana pengaitan tersebut banyak dipercaya oleh masyarakat internasional.

Ali Gufron selaku terdakwa melakukan wawancara dengan Tempo melalui pengacara muslim yang saat itu menjenguk di tahanan Polda Bali, dimana hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam kasus pengeboman di Bali ini Ali Gufron merupakan komandan umum yang menentukan semua tujuan pengeboman serta Ali Gufron juga menyatakan alasan ia memilih Bali sebagai tempat aksi melakukan pengeboman ini dimana alasan tersebut adalah karena Bali banyak sekali didatangi oleh turis dari berbagai negara termasuk Amerika beserta sekutunya. Tujuan dari pengeboman Bali yang dilakukan oleh Ali Gufron beserta anggotanya adalah untuk membalas perbuatan dari negara Amerika dan sekutunya yang telah melakukan hak sewenang-wenangnya terhadap kaum muslimin.¹⁵

¹⁵ Red, *Ali Gufron Alias Muchlas: "Saya Siap Dihukum 320 Tahun"*. Denpasar: Tempo, 2003, hlm 209.